



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

: PEMERINTAH KOTA SAMARINDA **LEMBAGA**

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAFIANI BARACK

: KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 2. Jabatan

3. NHK 948672

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

370.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

155.000.000

- MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
- MOBIL, DAIHATSU XENIA XENIA SPORT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, Rp. 15.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

	C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	34.000.000
	D.	SURAT BERHARGA	al.	all.	Rp.	al al
	E.	KAS DAN SETARA KAS	KON	Ker	Rp.	2.916.415
	F.	HARTA LAINNYA			Rp.	
	-	Sub Total	KPK-	KPK	Rp.	561.916. <mark>4</mark> 15
III. HUTANG				Rp.	390.755.511	
IV.	тот	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	W.	JOK-	Rp.	171.160.904

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.





Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

